

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Dalam pengamatan penulis ada beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode	Hasil Penelitian
1.	Niken Widiyanti (2015), <i>Identifikasi Industri Kreatif Pada Subsektor Kerajinan Blangkon Guna Menghadapi Asean Economic Community (Aec) Studi Kasus: Kecamatan Serengan, Surakarta</i>	Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan analisis SWOT	Dari hasil analisis SWOT dapat diketahui bahwa peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi MEA, terutama terkait tentang pemodalan. Perlu dilakukan perbaikan dalam teknologi yang digunakan sehingga dapat meningkatkan produksinya dan pemanfaatan media sosial sebagai media promosi juga sangat diperlukan untuk memasarkan produknya.

2.	Masruri (2013), Tesis <i>Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)</i>	Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian efektif tapi masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kurangnya tenaga kerja dan tenaga kerja yang ada tidak diisi dengan yang sesuai keahliannya. Waktu pelaksanaan pun tak sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada
----	--	--	---

3.	Ismail Ruslan (2012), Jurnal <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Pontianak</i>	Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif.	Berkembangnya lembaga perekonomian umat seperti LKMS / BMT merupakan indikasi terjadi perubahan paradigma masyarakat muslim Kota Pontianak dan sudah ada upaya reaktualisasi terhadap fungsi masjid. Data 2007 mencatat dari 29 Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) / Baitul Maal Wa At Tamwil (BMT) di Kalimantan Barat 7 diantaranya bersifat koordinatif dan berlokasi di masjid. Diantara 29 lembaga itu, 18 diantaranya berkedudukan di Kota Pontianak termasuk 6 BMT juga berkoordinasi dan berada di masjid (Pusat Inkubasi Usaha kecil - PINBUK KALBAR, 2007).
----	---	---	--

4.	Carolina Imran (2008), Skripsi <i>Masjid Sebagai Sentral Pemberdayaan Ekonomi Umat</i>	Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif.	Peran Masjid dalam pemberdayaan ekonomi belum signifikan, bila diukur dalam peningkatan taraf hidup para jama'ahnya. Karena masih ada beberapa kekurangan diantaranya ialah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya sosialisasi dan minimnya dana yang dimiliki oleh masjid.
----	--	---	---

5.	Rozzana Erziaty, Jurnal <i>Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan</i>	Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif.	Potensi yang dimiliki masjid di kota Banjarbaru dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi adalah sumberdaya manusia yang dimiliki masjid dalam kepengurusan organisasi masjid, aset infrastruktur masjid yang telah berdiri dengan bagus dan terpola dengan rapi berikut dengan fasilitas umumnya, dana adanya Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) dari umat dan remaja masjid.
----	---	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara garis besarnya terletak pada tempat dan program yang akan diteliti nantinya, tempat yang akan dijadikan penelitian adalah Masjid Jogokariyan Yogyakarta dan program yang akan diteliti adalah program jama'ah mandiri untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

a. Mengukur Efektivitas Pemberdayaan

Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan atau program yang dijalankan (Zulkaidi, 2005: 22) yang dapat dilihat dari:

- 1) Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan suatu persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan untuk mengatasi persoalan.
- 2) Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan atau program dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Untuk mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas memiliki berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis yakni (Martini dan Lubis, 1987: 55):

- a) Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan program untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan program.
- b) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c) Pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan program untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang ingin dipakainya. Pengertian yang memadai mengenai tujuan efektivitas ataupun sasaran merupakan langkah awal dalam pembahasan efektivitas, dimana hal ini sering kali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan atau program perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu: (Sutrisno, 48 : 2007).

- (1) Pemahaman program
- (2) Tepat sasaran
- (3) Tepat waktu

(4) Tercapainya tujuan

(5) Perubahan nyata

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Konsep Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan masyarakat mengacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan yang bermakna sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subyek bukan obyek (Erziaty, Jurnal).

(Sumodiningrat, 1999: 133) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu:

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*).
- 2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*).
- 3) Memberikan perlindungan (*Protecting*).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kemampuan para masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.

Pemberdayaan juga berarti upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mubyarto, 2000: 203).

Dalam pemberdayaan sendiri ini menunjuk pada kemampuan orang, khususnya untuk kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan mereka (Suharto, 2005: 128).

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu juga diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau

tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan telah diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sineris, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi yang ada:

1) Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan salah satu tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makan, pendapatan dan kesehatan. Pemberdayaan mencakup upaya untuk memahami permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat kedua.

2) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Tidak adanya akses merupakan

penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka yang berada di kelas yang rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Mengatasi kesenjangan berarti juga meningkatkan akses masyarakat, jika memungkinkan dikuasainya sumber daya oleh masyarakat. Pemberdayaan pada dimensi ini berarti dipahaminya situasi kesenjangan dan terdorongnya masyarakat untuk melakukan tindakan guna mengubahnya.

3) Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau merupakan kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Pemberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti upaya penyadaran bahwa kesenjangan tersebut adalah bentuk sosial yang dapat dan harus diubah.

4) Partisipasi

Masalah kesenjangan kelas pada tingkat ini tampak jelas pada tidak terwakilinya kelas bawah dalam berbagai lembaga

yang ada dalam masyarakat. Rakyat tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan, sehingga mereka dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5) Kontrol

Kesenjangan antarkelas ditingkat ini dimanifestasikan pada kesenjangan kuasa, ada penguasa dan yang dikuasai. Sebagian masyarakat menguasai berbagai macam sumber daya produksi, sementara sebagian lainnya tidak. Upaya untuk menguatkan organisasi masyarakat harus dilakukan sehingga kelas bawah dapat mengimbangi kekuasaan kelas atas dan mampu mewujudkan aspirasi mereka dengan cara mereka ikut memegang kendali atas sumber daya yang ada. Pemberayaan pada tingkat ini memungkinkan para masyarakat mendapatkan hak-haknya secara berkelanjutan. (Nany, 2011: Jurnal)

Indikator keberhasilan yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
 - d) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
 - e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan perekonomian keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Gunawan, 1999: 138).
- b. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk mensukseskan program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan. Pengalaman serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangannya, sehingga terjadinya proses saling belajar.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu serta proses pendampingan dan melibatkan pendamping yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai objek yang memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi

proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang hanya sebagai penunjang saja, sehingga pemberian bantuan tidak justru dapat melemahkan tingkat keswadayaannya.

4) Berkelanjutan

Program pemberdayaan juga sangat perlu dirancang untuk program yang berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri (Sri, 2005: 54).

c. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat atau temporer. Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang tepat untuk masyarakat.

Tahapan pemberdayaan masyarakat meliputi (Sulistiyani, 2004: 83):

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Tahap ini juga dapat disebut sebagai tahap persiapan dalam proses pengembangan masyarakat.

Pada tahap ini pihak pemberdaya berusaha untuk menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi

berlangsungnya proses pengembangan yang efektif. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran akan kondisinya saat itu dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan mampu memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

Pada tahap ini masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan tersebut. Sehingga akan menambah wawasan dan kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Pada tahap ketiga ini, tahap peningkatan kemandirian masyarakat yang ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan juga mampu membuat inovasi-inovasi di dalam lingkungannya, serta secara mandiri melakukan pembangunan.

Jadi bila dilihat dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi umat atau masyarakat ini untuk mencapai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan untuk memperkuat keberdayaan ekonomi masyarakat terlebih individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan dari sisi tujuan, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan perekonomian yaitu masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin dapat berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi merupakan suatu lapangan yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai agama yang sempurna, maka Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap persoalan ekonomi. Jangan sampai umat terjatuh dalam kekufuran karena terpuruknya ekonomi atau kemiskinan. Maka dalam Islam ada syari'at zakat, infak, wakaf, dan shadaqah. Semua ini dimaksudkan untuk membangun kepedulian antar sesama sekaligus memberdayakan ekonomi keumatan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat menggapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Pemberdayaan ekonomi diarahkan guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai

tambah paling tidak harus ada perbaikan akses kepada empat hal, yakni akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Jama'ah masjid barulah akan mencintai masjid, kalau masjid ikut juga memperhatikan kebutuhan jama'ah baik kebutuhan moral ataupun material (Dahlan, 2001: 121).

Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masjid dan masyarakat sekitar secara produktif dengan berlandaskan perhatian khusus dengan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat akan kebutuhan mereka serta Masjid Jogokariyan, tidak hanya dari segi moral akan tetapi juga dari segi material atau ekonomi.

3. Teori Infaq

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Didin, 1998: 14). Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah (Yusuf, 1993: 19).

Surat Ali- Imran: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 *ashnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Infaq dapat digunakan untuk mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia (Didin, 1998: 16).

4. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan menurut filosofi *Grameen* tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan, karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang. Dengan kata lain keterampilan bukan ukuran posisi sosial ekonomi seseorang. Keterampilan memerlukan dana untuk menatanya. Sementara orang miskin tidak memiliki cukup dana untuk itu. Walaupun ada sumbangan, itu tidak menuntut pertanggung jawaban, bahkan menciptakan ketergantungan, seperti Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah.

Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Karena merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan.

Melakukan pendekatan dengan metode pendekatan mata cacing adalah konsep pengentasan kemiskinan dengan melihat kemiskinan dari jarak yang sangat dekat, hampir-hampir menyatu dengan tanah yang dijelajahi. Pendekatan ini digunakan untuk memerangi kemiskinan. (Yunus, 2011: 50)